

Efektivitas Program Makan Bergizi Gratis Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Sosial: Kajian Literatur dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Muhsyi Alyah¹, Susi², Haslindah S³, Otong Karyono⁴

^{1,2,3}Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia

E-mail: Muhsyialyah1@gmail.com¹, susiagustina8822@gmail.com², haslindahsudirman@gmail.com³, karyono.otong@gmail.com⁴

Article History:

Received: 07 Agustus 2026

Revised: 17 Agustus 2026

Accepted: 19 Agustus 2026

Keywords: Program Makan Bergizi Gratis; kebijakan fiskal sosial; efektivitas kebijakan; ekonomi syariah; *maqāṣid al-syarī'ah*

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh besarnya alokasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal sosial yang memerlukan evaluasi terhadap efektivitas implementasinya, baik dari aspek kebijakan ekonomi maupun perspektif ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas MBG sebagai instrumen kebijakan fiskal sosial serta mengkaji implementasinya berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Penelitian menggunakan metode literature review dengan menghimpun, menelaah, dan menyintesis berbagai artikel ilmiah, buku, dokumen kebijakan, serta publikasi relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas MBG ditentukan oleh ketercapaian tujuan kebijakan, ketepatan sasaran penerima manfaat, kualitas tata kelola implementasi, dan keberlanjutan fiskal. Dalam perspektif ekonomi syariah, MBG memiliki orientasi yang selaras dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama dalam mendukung perlindungan jiwa, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Namun, implementasinya masih memerlukan penguatan agar mampu mewujudkan *maṣlaḥah*, menjamin keadilan distributif ('*adl*), serta menjunjung prinsip amanah dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Temuan penelitian menegaskan bahwa evaluasi kebijakan fiskal sosial perlu mengintegrasikan ukuran efektivitas kebijakan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah agar pelaksanaannya tidak hanya tepat sasaran dan berkelanjutan secara fiskal, tetapi juga adil serta berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

PENDAHULUAN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan strategis Pemerintah Indonesia yang dirancang untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui

implementasi program ini juga membawa implikasi ekonomi yang luas karena melibatkan alokasi anggaran negara dalam jumlah besar, penguatan rantai pasok pangan, pemberdayaan pelaku usaha lokal, serta penciptaan efek berganda (*multiplier effect*) terhadap aktivitas ekonomi daerah (Dwijayanti, 2024). Dengan cakupan yang demikian luas, MBG tidak hanya diposisikan sebagai program pemenuhan gizi, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan fiskal sosial yang diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Mursalin et al., 2026). Besarnya investasi fiskal yang dialokasikan pemerintah menjadikan efektivitas program ini sebagai isu yang penting untuk dikaji secara akademik agar pelaksanaannya benar-benar menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial yang optimal.

Diskursus mengenai efektivitas MBG tidak dapat dilepaskan dari fungsi kebijakan fiskal sebagai instrumen pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya, melakukan redistribusi pendapatan, serta menjaga stabilitas perekonomian (Putra et al., 2025). Dalam praktiknya, suatu kebijakan fiskal tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang diserap, melainkan juga dari kemampuan kebijakan tersebut dalam menghasilkan luaran dan dampak yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Adzam et al., 2025). Oleh karena itu, evaluasi terhadap efektivitas MBG perlu dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan berbagai dimensi, mulai dari aspek kesejahteraan masyarakat, ketahanan pangan, efisiensi penggunaan anggaran, hingga keberlanjutan pelaksanaan program. Kajian semacam ini menjadi penting mengingat kebijakan fiskal yang bersifat sosial harus mampu menciptakan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat dan tidak berhenti pada pencapaian target administratif semata.

Dalam perspektif ekonomi syariah, keberhasilan suatu kebijakan publik tidak hanya diukur melalui indikator ekonomi konvensional, tetapi juga berdasarkan sejauh mana kebijakan tersebut mampu menghadirkan kemaslahatan (*maslahah*), menjaga keadilan distribusi, menghindarkan kemudharatan, dan memenuhi tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) (Ritonga & Mawardi, 2025). Pendekatan ini memberikan sudut pandang yang lebih komprehensif karena menempatkan kesejahteraan manusia sebagai tujuan utama pembangunan (Khairunnisa Ibrahim & Mawardi, 2025). Dengan demikian, efektivitas Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya dapat ditinjau dari besarnya pertumbuhan ekonomi atau peningkatan daya beli masyarakat, tetapi juga dari kontribusinya terhadap perlindungan jiwa, peningkatan kualitas generasi, pemerataan akses terhadap pangan bergizi, serta terwujudnya keadilan sosial (Rahmalillah & Heris, 2026). Perspektif tersebut menjadi relevan untuk menilai apakah MBG telah selaras dengan nilai-nilai dasar ekonomi Islam dalam mewujudkan kemaslahatan publik.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas berbagai aspek yang berkaitan dengan program bantuan pangan, kebijakan fiskal, ketahanan pangan, maupun kesejahteraan masyarakat. Penelitian tersebut seperti penelitian yang dilakukan oleh Sodik & Riantani (2026) dengan hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan ekonomi dan perlindungan sosial di Indonesia telah berdampak positif dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan. Serta penelitian oleh Huda dan lainnya (2022) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal di Indonesia berdampak positif terhadap kesejahteraan sosial. Sebagian penelitian berfokus pada dampak ekonomi kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan dan distribusi pendapatan, sementara penelitian lain menitikberatkan pada efektivitas program bantuan sosial dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Di sisi lain, kajian mengenai MBG mulai berkembang seiring implementasi program tersebut. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Mursalin dan lainnya (2026) dengan hasil penelitian peningkatan nilai kontrak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Bengkulu berkorelasi positif dengan kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN). Selain itu, ekspansi belanja program ini terbukti

produsen lokal serta penguatan kontribusi ekonomi terhadap PDRB daerah. Kemudian penelitian oleh Rahmawati dan lainnya (2026) yang menunjukkan bahwa efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia masih tertinggal secara signifikan dibandingkan India dan Skotlandia akibat kendala pendanaan dan tata kelola, sehingga memerlukan penguatan koordinasi lintas sektor, transparansi anggaran, serta partisipasi aktif masyarakat agar pelaksanaannya lebih optimal dan berkelanjutan. Serta penelitian oleh Nurulaini & Afifah (2025) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah dasar Kota Semarang berhasil meningkatkan status gizi, kehadiran, dan motivasi belajar siswa. Berdasarkan hal tersebut sebagian besar masih berorientasi pada pembahasan teknis pelaksanaan, aspek gizi, tata kelola, maupun analisis kebijakan secara umum. Kajian yang secara khusus mengintegrasikan pembahasan efektivitas MBG sebagai instrumen kebijakan fiskal sosial dengan perspektif ekonomi syariah masih relatif terbatas dan belum banyak disintesis secara sistematis melalui telaah literatur.

Dari pengaljabaran di atas, penelitian ini menawarkan perbedaan mendasar dibandingkan penelitian sebelumnya. Pertama, penelitian ini tidak hanya menghimpun berbagai hasil penelitian mengenai MBG, tetapi juga menyintesis temuan-temuan tersebut untuk mengevaluasi efektivitas program sebagai instrumen kebijakan fiskal sosial. Kedua, penelitian ini menggunakan perspektif ekonomi syariah sebagai kerangka analisis utama, sehingga pembahasan tidak berhenti pada aspek efisiensi ekonomi, melainkan juga mencakup dimensi keadilan, kemaslahatan, pemerataan, dan tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan masyarakat. Ketiga, penelitian ini berupaya mengidentifikasi peluang, tantangan, serta rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil sintesis berbagai penelitian yang telah dipublikasikan sehingga dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan kebijakan publik yang lebih inklusif dan berorientasi pada nilai-nilai syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian yang berjudul "Efektivitas Program Makan Bergizi Gratis sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Sosial: Kajian Literatur dalam Perspektif Ekonomi Syariah" disusun untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai sejauh mana Program Makan Bergizi Gratis mampu menjalankan fungsinya sebagai instrumen kebijakan fiskal sosial dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. penelitian ini berupaya menyintesis berbagai temuan empiris dan konseptual yang telah dipublikasikan untuk mengidentifikasi efektivitas implementasi program serta relevansinya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Hasil penelitian diharapkan tidak hanya memperkaya khazanah keilmuan mengenai kebijakan fiskal sosial dalam perspektif Islam, tetapi juga memberikan landasan akademik bagi pengembangan kebijakan publik yang lebih efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Penelitian mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah banyak dikaji dari perspektif implementasi kebijakan publik, kesehatan, pendidikan, pembangunan sumber daya manusia, dan kebijakan fiskal. Suprpto et al. (2025) menunjukkan bahwa MBG berpotensi meningkatkan kualitas sumber daya manusia, partisipasi sekolah, serta pemberdayaan UMKM, meskipun masih menghadapi tantangan pada aspek tata kelola, monitoring, dan koordinasi antarlembaga. Penelitian Hadinata (2026) juga menegaskan bahwa keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh desain fiskal, kapasitas kelembagaan, dan akuntabilitas implementasi. sementara Saputri dan Utari (2026) menemukan bahwa MBG memberikan dampak positif terhadap status gizi, konsentrasi belajar, dan luaran pendidikan peserta didik. Pada lingkup internasional, manusia Wang & Young (2021) menyimpulkan bahwa program makan di sekolah mampu meningkatkan status gizi dan capaian akademik apabila didukung pembiayaan yang memadai.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya masih berfokus pada aspek

implementasi kebijakan, kesehatan, pendidikan, pembangunan sumber daya manusia, dan efisiensi fiskal. Belum banyak penelitian yang menganalisis MBG sebagai instrumen kebijakan fiskal sosial dengan menggunakan perspektif ekonomi syariah sebagai kerangka evaluasi. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan mengintegrasikan teori kebijakan fiskal sosial bersama konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah*, *maṣlahah*, prinsip keadilan ('*adl*), *amar ma'ruf nahi munkar*, dan tanggung jawab negara dalam Islam. Pendekatan ini memberikan sudut pandang yang berbeda karena efektivitas MBG tidak hanya dinilai berdasarkan indikator kebijakan publik, tetapi juga berdasarkan kemampuannya mewujudkan kemaslahatan, keadilan distributif, dan amanah dalam pengelolaan kebijakan publik sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

LANDASAN TEORI

Teori Kebijakan Fiskal Sosial

Teori kebijakan fiskal sosial menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama intervensi pemerintah melalui pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara. Dalam perspektif *Welfare Theory*, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari peningkatan kualitas hidup masyarakat yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan secara menyeluruh (Todaro & Smith, 2021). Sen melalui *Capability Approach* menegaskan bahwa kesejahteraan ditentukan oleh kemampuan individu dalam memperoleh kehidupan yang layak melalui akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan pemenuhan gizi (Programme, 2022). Pandangan tersebut sejalan dengan konsep *falah* dalam ekonomi Islam yang memaknai kesejahteraan sebagai keseimbangan antara dimensi material, spiritual, moral, dan sosial, sehingga suatu kebijakan publik dinilai berhasil apabila mampu menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat (Statistik, 2024). Dalam konteks ini, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diposisikan sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal sosial yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.

Pencapaian tujuan tersebut didukung oleh *Human Capital Theory* yang menjelaskan bahwa pendidikan, kesehatan, dan gizi merupakan investasi yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta produktivitas individu pada masa mendatang (UNICEF, 2023). Becker juga menegaskan bahwa modal manusia (*human capital*) merupakan aset bernilai ekonomi yang berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas, pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan daya saing nasional (Organization, 2021). Untuk menilai keberhasilan kebijakan tersebut, penelitian ini menggunakan teori efektivitas kebijakan publik yang menyatakan bahwa pencapaian tujuan program dipengaruhi oleh ketepatan sasaran, kecukupan anggaran, kualitas pelaksanaan, koordinasi antarlembaga, serta sistem pengawasan dan evaluasi (Nugroho, 2021). Sejalan dengan itu, Ripley dan Franklin menambahkan bahwa efektivitas implementasi juga ditentukan oleh kepatuhan pelaksana, kelancaran pelaksanaan program, dan keberhasilan mencapai tujuan kebijakan (Arbianto et al., 2024).

Perspektif Ekonomi Syariah

Perspektif ekonomi syariah menempatkan kebijakan publik sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan (*maṣlahah*) dan mencegah kemudharatan (*mafsadah*) sesuai dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*. Menurut Al-Syatibi, tujuan syariat diarahkan untuk menjaga lima kebutuhan dasar manusia (<

juga memiliki kewenangan menetapkan kebijakan berdasarkan prinsip *maṣlahah mursalah*, yaitu kebijakan yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash, tetapi tetap sejalan dengan tujuan syariat selama menghadirkan manfaat yang lebih besar daripada mudarat, mengandung keadilan, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam (Bedoui, 2021).

Selain berorientasi pada kemaslahatan, ekonomi syariah juga menempatkan prinsip keadilan (*'adl*), amanah, dan tanggung jawab negara sebagai dasar dalam penyelenggaraan kebijakan publik. Keadilan tidak hanya dimaknai sebagai pemberian manfaat yang sama kepada seluruh masyarakat, tetapi juga sebagai penempatan hak sesuai kebutuhan sehingga kelompok yang paling membutuhkan memperoleh prioritas pelayanan (Haneef, 2020). Di sisi lain, pemerintah berkewajiban menjalankan amanah melalui penyelenggaraan kebijakan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik sebagai implementasi nilai *amar ma'ruf nahi munkar* (Auda, 2021). Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, seperti pangan, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan keamanan, sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan yang selaras dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kajian literatur (*literature review*) sebagai metode utama untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai instrumen kebijakan fiskal sosial dalam perspektif ekonomi syariah (Syamsuddin et al., 2023). Pemilihan pendekatan tersebut didasarkan pada kemampuannya dalam menghimpun, mengintegrasikan, serta menginterpretasikan berbagai hasil penelitian dan publikasi ilmiah yang telah tersedia sehingga mampu menyajikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai landasan konseptual, implementasi kebijakan, efektivitas pelaksanaan program, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Tahapan penelitian diawali dengan penelusuran berbagai sumber pustaka yang memiliki relevansi dengan fokus kajian, meliputi artikel ilmiah, buku, dokumen kebijakan pemerintah, laporan resmi, serta berbagai karya akademik lainnya yang membahas Program Makan Bergizi Gratis, kebijakan fiskal sosial, kesejahteraan masyarakat, dan ekonomi syariah (Pasaribu et al., 2022). Seluruh literatur yang berhasil dihimpun kemudian ditelaah secara kritis melalui proses identifikasi, komparasi, evaluasi, dan sintesis terhadap konsep-konsep utama, landasan teoritis, serta temuan empiris yang telah dikemukakan dalam penelitian terdahulu. Melalui tahapan tersebut, penelitian ini berupaya membangun pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas Program Makan Bergizi Gratis sebagai kebijakan fiskal sosial, sekaligus mengidentifikasi berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat pencapaian tujuan program berdasarkan perspektif ekonomi syariah.

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif dengan cara memaparkan hasil kajian literatur secara sistematis dan terstruktur (Ultavia et al., 2023). Proses analisis tidak diarahkan pada pengolahan data statistik maupun pengujian hipotesis kuantitatif, melainkan difokuskan pada pendalaman makna, interpretasi, dan sintesis kritis terhadap berbagai temuan ilmiah yang menjadi objek kajian. Pendekatan deskriptif dipilih karena selaras dengan karakteristik penelitian berbasis *literature review*, yang menekankan pada proses integrasi pengetahuan, evaluasi kritis terhadap hasil penelitian terdahulu, serta penyusunan argumentasi ilmiah yang bertumpu pada kekuatan teori dan bukti empiris yang tersedia. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas Program Makan

nilai-nilai dasar ekonomi syariah, seperti keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*maṣlahah*), pemerataan distribusi, dan tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan publik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Program Makan Bergizi Gratis sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Sosial

Dalam ekonomi konvensional, kebijakan fiskal dipahami sebagai instrumen pemerintah untuk memengaruhi aktivitas perekonomian melalui pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara dalam rangka menciptakan stabilitas serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wolfson, sebagaimana dikutip oleh Suparmoko, menjelaskan bahwa kebijakan fiskal mencakup pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah, mobilisasi sumber daya, serta penetapan harga barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan (Jaelani, 2014). Sementara itu, Samuelson dan Nordhaus memandang kebijakan fiskal sebagai upaya pemerintah dalam mengelola perpajakan dan pengeluaran publik untuk meredam fluktuasi siklus ekonomi, mendorong pertumbuhan, memperluas kesempatan kerja, serta menjaga tingkat inflasi agar tetap terkendali (Darise, 2025). Dalam praktiknya, kebijakan fiskal di Indonesia diwujudkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menjadi instrumen utama pemerintah dalam menjalankan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi ekonomi.

Di negara berkembang, fungsi kebijakan fiskal tidak lagi terbatas pada upaya menjaga stabilitas makroekonomi, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat dimensi sosial melalui penyediaan layanan publik dan pemerataan kesejahteraan. Pengalokasian anggaran pada sektor-sektor strategis, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mengurangi kesenjangan sosial. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, di antaranya keterbatasan kapasitas kelembagaan, sempitnya ruang fiskal, serta tingginya ketergantungan terhadap pembiayaan utang sehingga efektivitas kebijakan sangat bergantung pada kualitas pengelolaan anggaran dan tata kelola program (Huda et al., 2022). Oleh karena itu, alokasi anggaran pada sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur menjadi prioritas untuk memperkuat produktivitas serta ketahanan ekonomi.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan agenda strategis pemerintah yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan sasaran utama peserta didik dan kelompok rentan. Berbeda dari bantuan sosial yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan konsumsi jangka pendek, MBG dirancang sebagai instrumen investasi publik untuk memperkuat kualitas modal manusia melalui penyediaan pangan bergizi secara berkesinambungan. Dengan demikian, program ini tidak hanya merepresentasikan upaya perlindungan sosial, tetapi juga menjadi bagian integral dari kebijakan fiskal yang diarahkan untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia secara berkelanjutan. Tujuan utama MBG adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini melalui penyediaan makanan yang memenuhi standar gizi. Pemerintah mengharapkan program ini mampu menekan angka stunting dan malnutrisi, meningkatkan konsentrasi serta prestasi belajar peserta didik, memperkuat ketahanan pangan rumah tangga, dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas masyarakat dalam jangka panjang. (Sujud, 2026).

Berdasarkan hasil sintesis berbagai literatur, efektivitas MBG sebagai instrumen kebijakan fiskal sosial tidak dapat dinilai hanya dari besarnya anggaran yang dialokasikan ataupun jumlah penerima manfaat. Sebaliknya, efektivitas lebih tepat dipahami sebagai kemampuan program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui implementasi yang tepat sasaran, tata kelola yang baik, serta dukungan fiskal yang berkelanjutan. Pola tersebut muncul secara konsisten dalam

berbagai kajian sehingga menunjukkan bahwa keberhasilan MBG merupakan hasil interaksi dari beberapa aspek yang saling berkaitan.

Aspek pertama yang paling banyak dibahas dalam literatur adalah ketercapaian tujuan kebijakan. Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya peserta didik dan kelompok rentan, sebagai bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia. Berbagai kajian mengaitkan pemenuhan gizi yang memadai dengan perbaikan kondisi kesehatan, perkembangan kognitif, peningkatan konsentrasi belajar, serta pembentukan modal manusia (*human capital*) dalam jangka panjang. Oleh karena itu, efektivitas MBG tidak hanya diukur dari terselenggaranya distribusi makanan bergizi, tetapi juga dari sejauh mana program mampu menghasilkan perubahan yang sesuai dengan tujuan kebijakan (Savio et al., 2025).

Aspek berikutnya adalah ketepatan sasaran penerima manfaat. Sebagai kebijakan fiskal sosial, keberhasilan MBG sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah memastikan bahwa manfaat program diterima oleh kelompok yang menjadi prioritas. Literatur menekankan bahwa akurasi penargetan dan pemerataan akses merupakan faktor penting untuk memaksimalkan manfaat sosial sekaligus menghindari kesalahan dalam penentuan penerima manfaat. Ketidaktepatan sasaran tidak hanya menurunkan efisiensi penggunaan anggaran negara, tetapi juga mengurangi efektivitas program dalam menjawab kebutuhan kelompok yang paling memerlukan intervensi pemerintah (Rais et al., 2025).

Selain itu, kualitas tata kelola implementasi juga menjadi perhatian dalam berbagai kajian. Pelaksanaan MBG melibatkan banyak pemangku kepentingan sehingga memerlukan koordinasi yang efektif, sistem distribusi yang andal, mekanisme pengawasan yang memadai, serta pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel. Tata kelola yang baik akan mendukung konsistensi pelaksanaan program dan menjaga kualitas layanan yang diterima masyarakat. Sebaliknya, lemahnya koordinasi maupun pengawasan berpotensi menghambat pencapaian tujuan meskipun didukung oleh alokasi anggaran yang besar.

Di samping itu, keberlanjutan fiskal menjadi dimensi yang tidak dapat diabaikan dalam menilai efektivitas MBG. Sebagai program yang dibiayai melalui APBN, keberlangsungan implementasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara pembiayaan program dan kapasitas fiskal negara. Oleh karena itu, efisiensi pengelolaan anggaran, penetapan prioritas belanja, serta evaluasi berkala terhadap capaian program menjadi prasyarat penting agar manfaat MBG dapat terus dirasakan tanpa mengurangi stabilitas fiskal dalam jangka panjang (Zulaika et al., 2025).

Secara keseluruhan, hasil sintesis literatur memperlihatkan bahwa efektivitas Program Makan Bergizi Gratis tidak ditentukan oleh satu indikator tunggal, melainkan oleh keterpaduan antara ketercapaian tujuan kebijakan, ketepatan sasaran penerima manfaat, kualitas tata kelola implementasi, dan keberlanjutan fiskal. Keempat aspek tersebut saling melengkapi dalam membentuk keberhasilan MBG sebagai instrumen kebijakan fiskal sosial. Dengan demikian, evaluasi terhadap program ini perlu dilakukan secara komprehensif agar mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai manfaat sosial yang dihasilkan sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan perbaikan kebijakan pada masa mendatang.

Program Makan Bergizi Gratis dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada dasarnya memiliki tujuan yang selaras dengan nilai-nilai dasar ekonomi syariah, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pembangunan kualitas sumber daya manusia. Akan tetapi, ekonomi syariah tidak hanya menilai suatu kebijakan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai,

melainkan juga memperhatikan proses pelaksanaan, tata kelola, serta dampak nyata yang dihasilkan. Dengan demikian, keberhasilan MBG tidak dapat dinilai hanya dari besarnya anggaran yang dialokasikan atau luasnya cakupan penerima manfaat, tetapi juga dari sejauh mana implementasinya mampu menghadirkan kemaslahatan, menegakkan keadilan, dan menghindarkan kemudharatan bagi masyarakat. Berdasarkan hasil sintesis literatur, analisis terhadap MBG dalam perspektif ekonomi syariah dapat ditinjau melalui prinsip *maqāsid al-syarī'ah*, *maṣlahah*, keadilan ('*adl*), dan amanah dalam pengelolaan keuangan publik.

Ditinjau dari perspektif *maqāsid al-syarī'ah*, MBG memiliki orientasi yang sejalan dengan tujuan syariat, khususnya dalam menjaga jiwa (*hifẓ al-nafs*) melalui pemenuhan kebutuhan gizi dan menjaga akal (*hifẓ al-'aql*) melalui peningkatan kualitas kesehatan dan kemampuan belajar peserta didik. Dalam jangka panjang, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga berpotensi mendukung perlindungan harta (*hifẓ al-māl*) karena menghasilkan masyarakat yang lebih produktif. Namun demikian, pencapaian tujuan tersebut tidak berlangsung secara otomatis. Perspektif *maqāsid al-syarī'ah* menuntut agar manfaat yang direncanakan benar-benar terwujud dalam praktik (Heryana, 2026). Oleh karena itu, apabila kualitas makanan tidak memenuhi standar gizi, distribusi belum merata, atau implementasi program tidak berjalan secara konsisten, maka tujuan syariah yang ingin dicapai belum sepenuhnya terealisasi meskipun kebijakannya memiliki tujuan yang baik.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada dasarnya memiliki orientasi untuk mewujudkan kemaslahatan publik melalui peningkatan kualitas gizi dan pembangunan sumber daya manusia. Namun, dalam ekonomi syariah, *maṣlahah* tidak hanya dinilai dari tujuan kebijakan, melainkan juga dari keseimbangan antara manfaat yang dihasilkan dan potensi mudarat yang ditimbulkan. Oleh karena itu, suatu kebijakan belum dapat dikatakan sepenuhnya memenuhi prinsip *al-maṣlahah al-'āmmah* apabila manfaat pada satu sektor justru mengurangi kemaslahatan pada sektor lain yang sama pentingnya. Implementasi MBG masih memunculkan ruang evaluasi, terutama terkait ketepatan sasaran penerima manfaat, efektivitas penggunaan anggaran, serta potensi bergesernya prioritas pembiayaan pada sektor publik lainnya. Selain itu, pola implementasi yang bersifat inklusif tanpa mempertimbangkan tingkat kebutuhan penerima juga memunculkan diskusi mengenai apakah manfaat program telah terdistribusi secara optimal kepada kelompok yang paling membutuhkan. Dengan demikian, dalam perspektif ekonomi syariah, MBG berpotensi mewujudkan *maṣlahah*, tetapi pencapaiannya sangat bergantung pada efektivitas implementasi (Awaluddin, 2026), efisiensi pengelolaan anggaran, serta kemampuan pemerintah memastikan bahwa kemanfaatan yang dihasilkan benar-benar lebih besar daripada potensi mudarat yang mungkin muncul.

Prinsip keadilan ('*adl*) juga memberikan ruang untuk mengevaluasi mekanisme distribusi manfaat dalam MBG. Dalam ekonomi syariah, keadilan tidak selalu dimaknai sebagai pemberian manfaat yang sama kepada seluruh individu, melainkan menempatkan hak sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kemaslahatan. Oleh karena itu, pemberian manfaat secara luas kepada seluruh kelompok sasaran masih membuka ruang diskusi mengenai ketepatan distribusi apabila terdapat kelompok yang secara ekonomi relatif mampu menerima manfaat yang sama dengan kelompok yang lebih rentan. Dari sudut pandang ini, kebijakan yang berorientasi pada pemerataan tetap perlu diimbangi dengan mekanisme penargetan yang proporsional agar alokasi anggaran publik benar-benar memberikan manfaat yang lebih besar kepada pihak yang paling membutuhkan (Achmad et al., 2025). Dengan demikian, efektivitas distribusi dalam pers

amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Konsekuensinya, keberhasilan MBG tidak hanya bergantung pada tercapainya tujuan sosial, tetapi juga pada integritas tata kelola anggaran. Program yang melibatkan pembiayaan dalam jumlah besar memerlukan sistem pengadaan, distribusi, dan pengawasan yang transparan serta akuntabel agar terhindar dari praktik pemborosan, konflik kepentingan, maupun perilaku mencari keuntungan (*rent seeking*) yang dapat mengurangi nilai kemaslahatan kebijakan. Dalam perspektif syariah, pemanfaatan anggaran negara untuk kepentingan publik harus diarahkan sepenuhnya pada pelayanan masyarakat, bukan menjadi ruang untuk memperoleh keuntungan yang mengorbankan kepentingan umum (Fakhrurrazi, 2025). Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan MBG, semakin besar pula peluang program tersebut memenuhi prinsip amanah dalam ekonomi Islam.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa Program Makan Bergizi Gratis pada dasarnya memiliki tujuan yang sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pembangunan kualitas sumber daya manusia. Namun demikian, kesesuaian tersebut tidak dapat dinilai hanya dari orientasi kebijakannya, melainkan harus dibuktikan melalui kualitas implementasi di lapangan. Dalam perspektif ekonomi syariah, suatu kebijakan baru dapat dikatakan memenuhi nilai *maqāṣid al-syarī'ah* apabila manfaat yang dihasilkan benar-benar dirasakan oleh masyarakat, didistribusikan secara adil, dikelola secara amanah, serta memberikan kemaslahatan yang lebih besar dibandingkan potensi mudarat yang ditimbulkan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap MBG perlu dilakukan secara berkelanjutan agar tujuan sosial yang diharapkan tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar terwujud dalam praktik penyelenggaraan kebijakan publik.

Peluang dan Tantangan Implementasi Program Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki peluang yang besar untuk memperkuat fungsi kebijakan fiskal sosial di Indonesia. Sebagai program yang memanfaatkan APBN untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, MBG tidak hanya berpotensi meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan peserta didik, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan kemampuan belajar, produktivitas, dan kualitas modal manusia (*human capital*). Selain itu, pelibatan petani, nelayan, pelaku UMKM, serta penyedia jasa pangan dalam rantai pasok program membuka peluang terciptanya efek berganda (*multiplier effect*) terhadap perekonomian lokal. Dengan demikian, apabila dikelola secara efektif (Rahmadhani et al., 2026), MBG tidak hanya memberikan manfaat sosial bagi penerima program, tetapi juga mampu memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat melalui optimalisasi belanja negara.

Di sisi lain, implementasi MBG masih menghadapi sejumlah tantangan yang dapat memengaruhi efektivitasnya sebagai instrumen kebijakan fiskal sosial. Tantangan tersebut meliputi ketepatan sasaran penerima manfaat, kualitas tata kelola, keberlanjutan pembiayaan, serta kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara besarnya anggaran yang dialokasikan dengan manfaat yang dihasilkan. Selain itu, pelaksanaan program yang melibatkan banyak aktor juga meningkatkan kebutuhan terhadap sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel untuk meminimalkan potensi pemborosan, konflik kepentingan, maupun praktik *rent seeking* (Bimantoro et al., 2026). Dalam perspektif ekonomi syariah, tantangan tersebut menjadi penting karena keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya diukur dari tercapainya tujuan, tetapi juga dari proses implementasi yang menjunjung prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan.

Keberhasilan MBG sangat bergantung pada kemampuan pemerintah mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan tata kelola dalam satu kerangka kebijakan yang berkelanjutan.

Peningkatan kualitas gizi dan pembangunan sumber daya manusia perlu diimbangi dengan mekanisme distribusi yang lebih tepat sasaran, sistem evaluasi yang berbasis hasil, serta pengelolaan anggaran yang efisien agar manfaat program tidak berhenti pada pencapaian jangka pendek. Pada saat yang sama, penguatan koordinasi antarlembaga, peningkatan partisipasi masyarakat, serta keterbukaan informasi publik menjadi faktor pendukung yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan program (Yusuf et al., 2026).

Berdasarkan sintesis tersebut, dapat dipahami bahwa peluang dan tantangan MBG merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam menilai keberhasilan program sebagai instrumen kebijakan fiskal sosial. Besarnya potensi yang dimiliki MBG akan sulit diwujudkan apabila berbagai tantangan implementasi tidak memperoleh perhatian yang memadai. Sebaliknya, penyempurnaan tata kelola, peningkatan ketepatan sasaran, serta penguatan akuntabilitas pengelolaan anggaran akan memperbesar peluang MBG untuk menghasilkan kemanfaatan publik yang lebih optimal. Dengan demikian, efektivitas MBG tidak hanya ditentukan oleh besarnya komitmen fiskal pemerintah, tetapi juga oleh kemampuan seluruh pemangku kepentingan dalam memastikan bahwa setiap tahapan implementasi berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan dan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

KESIMPULAN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki potensi yang besar sebagai instrumen kebijakan fiskal sosial dalam mendukung peningkatan kualitas gizi, pembangunan sumber daya manusia, dan penguatan fungsi perlindungan sosial. Namun, efektivitas program tidak ditentukan semata oleh besarnya alokasi anggaran maupun luasnya cakupan penerima manfaat, melainkan oleh keterpaduan antara ketercapaian tujuan kebijakan, ketepatan sasaran, kualitas tata kelola implementasi, dan keberlanjutan fiskal. Ditinjau dari perspektif ekonomi syariah, MBG pada dasarnya memiliki orientasi yang selaras dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* karena diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia. Meskipun demikian, keselarasan tersebut tidak dapat dinilai hanya dari tujuan kebijakannya, tetapi juga harus dibuktikan melalui implementasi yang mampu menghadirkan *maṣlahah*, menjamin keadilan distribusi (*'adl*), serta menjunjung prinsip amanah dalam pengelolaan keuangan publik. Oleh karena itu, keberhasilan MBG sebagai kebijakan fiskal sosial tidak hanya bergantung pada realisasi program secara administratif, tetapi juga pada kemampuannya menghasilkan manfaat yang nyata, tepat sasaran, dikelola secara transparan, serta memberikan kemanfaatan yang lebih besar daripada potensi mudarat yang mungkin timbul. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa evaluasi kebijakan fiskal sosial akan lebih komprehensif apabila tidak hanya menggunakan indikator ekonomi konvensional, tetapi juga mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah sebagai kerangka dalam menilai efektivitas, keadilan, dan kemaslahatan suatu kebijakan publik.

DAFTAR REFERENSI

- Achmad, I. A., Emirati, & Basra, J. (2025). Polemik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan kesenjangan akses pada sekolah nonformal: Studi kasus PKBM dalam Program Paket A. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Mahasiswa dan Akademisi*, 1(4), 24–32. <https://doi.org/10.64690/intelektual.v1i4.318>
- Adam, M. (2026). Rekonstruksi kepercayaan publik terhadap MBG dalam mendukung tumbuh kembang dan kualitas pembelajaran anak: Perspektif ekonomi syariah. *Al-ATHFAL: Jurnal Pendidikan*

- Adzam, M., Lubis, M. M., Rahmayani, M. W., Kusumastuti, S. Y., Kusumawardhani, F., Juniartika, S., & Fathah, R. N. (2025). *Dinamika kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia*. Star Digital Publishing.
- Arbianto, A., Wicaksono, D. S., & Paselle, E. (2024). Implementasi kebijakan disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur. *Dinamika: Jurnal Manajemen Sosial Ekonomi*, 4(2), 120–127.
- Awaluddin, S. (2026). Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Pertentangan konstitusional dan prinsip masalah dalam kebijakan publik. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 3(3), 28–39. <https://doi.org/10.62383/humif.v3i3.3211>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Indikator kesejahteraan rakyat 2024*.
- Bimantoro, T., Sasongko, A. B., & Kamilia, A. (2026). Indications of manufactured incompetence: Neopatrimonial governance and public service erosion in Indonesia's Free Nutritious Meal Program. *Priviet Social Sciences Journal*, 6(4), 284–300. <https://doi.org/10.55942/pssj.v6i4.1761>
- Darise, R. I. (2025). *Ekonomi publik: Konsep, kebijakan, dan aplikasi dalam pembangunan*. Sanskara Karya Internasional.
- Dwijayanti, A. (2024). Policy spillover: Analisis jaringan dampak kebijakan makan siang bergizi gratis terhadap sektor pertanian. *Jurnal Administrasi Publik*, 20(2), 281–308.
- Hadinata, M. (2026). Free Nutritious Meal Policy in Indonesia under President Prabowo: A policy, fiscal, and political analysis grounded in international evidence. *Jurnal Bina Praja*, 18(1), 65–78. <https://doi.org/10.21787/jbp.18.2026.2896>
- Huda, R. A., Puspita, R. A., Hasanah, S. N., & Malik, A. (2024). Peran kebijakan fiskal dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di Indonesia sebagai negara berkembang. *Kalianda Halok Gagas*, 7(2), 189–201. <https://doi.org/10.52655/KHG.V7I2.102>
- Ibrahim, E. K., & Mawardi. (2025). Analisis konsep masalah sebagai prinsip dan tujuan ekonomi Islam. *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah*, 7(2), 1–19. <https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v7i2.871>
- Jaelani, A. (2014). *Keuangan publik Islam: Refleksi APBN dan politik anggaran di Indonesia*. Nurjati Press.
- Mursalin, I. A., Anggrayni, H. F., Viranda, Y. A., Rakhmanto, P. S., Ardhanie, N. D., & Martini. (2026). Program Makan Bergizi Gratis dan pembangunan ekonomi lokal inklusif di Provinsi Bengkulu. *SOLUSI: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 24(1), 93–112. [https://doi.org/10.26623/slsi.v24i1.1339](https://doi.org/10.26623/slsi.v24i1.13399)

- Rahmawati, L. D., Kusuma, I. R., Nabiihah, F. L. A., Atqiya, N. S., & Larasati, K. A. A. (2026). Scoping review: Analisis implementasi Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia dan negara lain: Studi komparatif berdasarkan kebijakan dan efektivitas program. *Jurnal Riset Ilmiah*, 3(1), 67–76.
- Rais, L., Halik, W., Taopan, A., Rumodar, M., Yanyaan, R. R., & Saiba, R. L. (2025). Keadilan sosial dalam pembangunan: Tinjauan literatur terhadap kebijakan pembangunan dengan adanya efisiensi anggaran dari pusat. *Papua Journal of Sociology*, 3(1), 38–55.
- Ritonga, M. J., & Mawardi. (2025). Landasan filosofis pemikiran ekonomi syariah: Prinsip masalah sebagai pilar utama. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(1), 189–200.
- Savio, E. da C., Carmo, O. M. O. do, Langoday, T. O., Lay, A. S. Y., Lemaking, V. B., Exposto, L. A. S. M., Oki, K. K., Lopes, A. D. S., Ketmoen, A., Pacheco, C. do R., & Supadi, Y. M. (2025). *Ekonomi kesehatan dan ketahanan gizi: Fondasi membangun bangsa*. PT Star Digital Publishing.
- Sodik, G., & Riantani, S. (2026). Analisis dampak kebijakan ekonomi terhadap pendapatan, ketimpangan, dan kemiskinan di Indonesia: Suatu tinjauan pustaka *Economic Development* oleh Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 7(2), 95–116.
- Sujud, F. A. (2026). Upaya transformasi kesejahteraan dan keadilan sosial melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi peserta didik. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Al-Ghobi*, 3(1), 24–37.
- Suprpto, F. A., Praditya, E., Dewi, R. M., & Adiyoso, W. (2025). A policy implementation review of the Free Nutritious Meal (MBG) Program. *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, 6(2), 297–312. <https://doi.org/10.46456/jisdep.v6i2.798>
- Syamsuddin, N., Simbolon, G. A. H., Surni, Gani, R. A., Bugis, H., Towe, M. M., Guntur, M., Maulidah, S., Taufik, M., Presty, M. R., & Pitri, A. D. (2023). *Dasar-dasar metode penelitian kualitatif*. Yayasan Hamjah Diha.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2021). *Economic development* (13th ed.). Pearson.
- Ultavia, A., Jannati, P., Malahati, F., Qathrunnada, & Shaleh. (2023). Kualitatif: Memahami karakteristik penelitian sebagai metodologi. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 11(2), 341–348.
- UNICEF. (2023). *The State of the World's Children 2023: For every child, vaccination*.
- United Nations Development Programme. (2022). *Human development report 2021/2022: Uncertain times, unsettled lives*.
- Wang, D., Shinde, S., Young, T., & Fawzi, W. W. (2021). Impacts of school feeding on educational and health outcomes of school-age children and adolescents in low- and middle-income countries: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Global Health*, 11, 04051.